

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi sebagian dari Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Diajukan Oleh:**

**Frans Eric Junior Siagian**

**NPM : 1701120003.P**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIDINANTI  
PALEMBANG**

**2019**

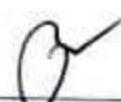
**UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI  
PALEMBANG**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

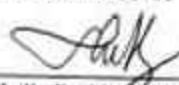
Nama : Frans Eric Junior Siagian  
Nomor Pokok/NPM : 1701120003.P  
Jurusan/Prog.Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata I  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan  
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  
dalam meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sumatera  
Selatan

Pembimbing Skripsi

Tanggal 24/03/2020 Pembimbing I

  
Meti Zuliyana, SE.,MSI.,AK.,CA  
NIDN : 0205056701

Tanggal 28/03/2020 Pembimbing II

  
Shelly Farida Yobing, SE., Ak., M.Si  
NIDN: 0205026301

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Ekonomi,



  
Dr. Masayu Mikial, SE.,Ak., MSI.,CA  
NIDN : 0220085901

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frans Eric Junior Siagian

NPM : 1701120003.P

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi ini yang berjudul :

**"ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUAMTERA SELATAN"** adalah benar-benar merupakan karya asli saya. Kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan, kekeliruan dengan skripsi ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Palembang, 12 Januari 2020

  
Frans Eric Junior Siagian

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Analisis Penerimaan Pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam meningkatkan pendapatan daerah provinsi sumatera selatan**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Ibu Dr. Ir. Hj. Nyimas Manisah MP, selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang.
2. Yth. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE., Ak., MSi., CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
3. Yth. Ibu Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA, Ketua Jurusan Ekonomi Akuntansi dan dosen pembimbing skripsi I yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat pada penulis.
4. Ibu Shelly Farida Tobing, SE., Ak., MSi, selaku pembimbing skripsi II yang penuh dengan keikhlasan membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Yth. Ibu Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Bapenda Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan akses secara terbuka kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Papa dan Mama, Kakak serta adik-adikku, yang senantiasa memberikan doa, serta keluarga besar yang telah memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan studi.
8. Teman-teman Universitas Tridinanti Palembang.
9. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan penulis sendiri khususnya, dan dapat menjadi sumbangan ilmu bagi almamater serta amal kebaikan bagi penulis.

Palembang 6 Desember 2019



Frans Eric Junior Siagian

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kajian Teoritis .....	7
2.1.1 Pajak.....	7
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.1.2 Fungsi Pajak .....	8
2.1.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	9
2.1.1.4 Tarif pajak .....	10
2.1.1.5 Pengelompokan Pajak .....	12
2.1.2 Pajak Daerah.....	13
2.1.2.1 Pajak Kendaraan bermotor (PKB) .....	16
2.1.2.2 Objek Kendaraan Bermotor .....	17

2.1.2.3 Subjek & Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	18
2.1.2.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
2.1.2.5 Dasar perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor .....	19
2.1.2.6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor .....	20
2.1.2.7 Tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor...	21
2.1.2.8 Pendaftaran & pendataan wajib pajak kendaraan....	21
2.1.2.9 Penetapan Pajak kendaraan bermotor .....	22
2.1.2.10 Pembayaran pajak kendaraan bermotor .....	22
2.1.2.11 Penagihan pajak kendaraan bermotor .....	22
2.1.2.12 Sanksi atas pajak kendaraan bermotor .....	23
2.2 Penelitian yang Relevan .....	23
2.3 Kerangka Berpikir .....	25

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
3.1.1 Tempat Penelitian.....	27
3.1.2 Waktu Penelitian .....	27
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.2.1 Sumber Data.....	27
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.3 Populasi, Sampel dan <i>Sampling</i> .....	29
3.3.1 Populasi .....	29
3.3.2 Sampel.....	29
3.3.3 <i>Sampling</i> .....	29
3.4 Rancangan Penelitian.....	30
3.5 Variabel dan Definisi Operasional.....	30
3.5.1 Variabel.....	30
3.5.2 Definisi Operasional.....	32
3.6 Instrumen Penelitian .....	32
3.7 Teknik Analisis .....	33

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Gambaran Umum Bapenda .....	37
4.1.2 Visi dan Misi .....	38
4.1.3 Struktur Organisasi .....	39
4.1.4 Fungsi dan Ketentuan Umum Bapenda .....	41
4.1.5 Mekanisme Pendaftaran Kendaraan baru dan BBN-KB di unit pelayanan samsat UPTB kota Palembang I & II .....	42
4.2 Pembahasan.....	46
4.2.1 Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Meningkatkan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan .....	46
4.2.1.1 Sebaran kendaraan bermotor di provinsi Sumatera selatan .....	46
4.2.1.2 Kontribusi Pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan.....	49
4.2.1.3 Pertumbuhan PKB provinsi Sumatera Selatan .....	51
4.2.1.4 Hambatan Penerimaan PKB .....	54
4.2.1.5 Upaya dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor.....	59

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran .....	65
Daftar Pustaka .....	67



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Penerimaan PKB .....	3
Tabel 1.2 Daftar Jumlah Tunggakan PKB.....	3
Tabel 2.1 Tarif Pajak Proporsional .....	11
Tabel 2.2 Tarif Pajak Progresif.....	11
Tabel 2.3 Penelitian Yang Relevan.....	24
Tabel 3.1 Variabel dan Definisi Operasional	32
Tabel 3.2 Klarifikasi Kriteria Kontribusi.....	34
Tabel 4.1 Sebaran mobil menurut kab/kota di provinsi sum-sel.....	47
Tabel 4.2 Analisis Kontribusi PKB terhadap PAD	51
Tabel 4.3 Rasio Pertumbuhan PKB	53

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Pengelompokan Pajak.....	12
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPENDA.....	40
Gambar 4.2 Mekanisme pendaftaran kendaraan baru dan BBN-KB .....	45
Gambar 4.3 Jumlah sebaran kendaraan bermotor menurut kabupaten /kota di provinsi sumatera selatan.....	46
Gambar 4.4 Jenis-jenis di provinsi sumatera selatan tahun 2018 .....	49
Gambar 4.5 Rasio Pertumbuhan PKB.....	54

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (dibawah bimbingan ibu Meti Zuliyana, SE.,M.Si. Ak, CA dan Ibu Shelly Farida Tobing, SE.,Ak.,Msi)**

Dalam Perencanaan Pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan kota Palembang disingkat dengan Bapenda, Merupakan lembaga tehnik dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang di pimpin oleh seorang badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur ataupun Walikota ataupun Bupati melalui sekretaris daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur atau Walikota atau bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan pembangunan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menjelaskan upaya - upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). penelitian ini data premier dan sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dengan turun langsung ke objek penelitian dengan melakukan wawancara, dokumen-dokumen dan observasi ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun nya selalu meningkat. Maka dari itu Samsat harus mensosialisasikan lagi cara-cara yang lebih praktis untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

**Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Daerah**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF RECEIVING MOTOR VEHICLE TAX (PKB) IN ORDER TO INCREASE THE INCOME OF SOUTH SUMATERA PROVINCE (Under the guidance of Meti Zuliyana, SE.,M.Si.Ak.,CA and Ms. Shelly Farida Tobing, SE.,Ak.,Msi)**

In regional development planning, research and development of the city of Palembang, abbreviated as Bapenda, is a technical institute in the field of research and regional development planning which is led by a body which is under and is responsible to the Governor or Mayor or Regent through the regional secretary. This body has the main task of assisting the Governor or Mayor or regent in the administration of regional government in the area of regional research and development.

This study aims to evaluate and explain efforts to increase regional income from the Motor Vehicle Tax (PKB). This research is premier and secondary data, that is the data obtained by the writer by going directly to the object of research by conducting interviews, documents and observations in the field to support the research conducted in order to obtain the expected data source. The results of this study found that the revenue of Motor Vehicle Tax (PKB) every year is always increasing. Therefore Samsat must further socialize more practical ways to pay Motor Vehicle Tax.

***Keyword : Vehicle Tax, Regional Income***

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**FRANS ERIC JUNIOR SIAGIAN**, Lahir di Palembang pada tanggal 12 Juli 1994 anak Ketiga dari pasangan Bapak Usman Siagian & Ibu Deli Mandan Sitorus dan beralamat di Jalan Sukabangun 2 Ir. Kaur SoakSimpur RT 63 RW 09 Kec. Sukarame Kel. Sukajaya Palembang, Sumatera Selatan.

Sekolah dasar diselesaikan pada tahun 2006 di Methodist 1 Palembang, kemudian Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2009 di SMP Methodist 1 Palembang, selanjutnya Sekolah Menengah Atas diselesaikan pada tahun 2012 di SMA Xaverius 2 Palembang. Pada tahun 2013 melanjutkan studi ke D3 di Universitas Negeri Sriwijaya Jurusan Akuntansi dan lulus pada Agustus 2016. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan jenjang ke S1 ke Universitas Tridinanti Palembang Fakultas Ekonomi Jurusan Akutansi.

Setelah tamat dari D3 Universitas Negeri Sriwijaya bekerja di PT Toyota Astra Financial Service dari 1 Juli 2017 sampai sekarang.

Palembang, 13 Januari 2020



Frans Eric Junior Siagian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Proses pembangunan negara merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan dilakukan secara terencana selaras dengan perubahan-perubahan guna untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui implementasi berbagai kegiatan yang didasarkan pada rencana yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan semua sektor pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana untuk menaikkan taraf hidup masyarakat dan mendukung program pemerintah agar terlaksana secara berkesinambungan, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan guna mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerahnya karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting yang menopang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri. Oleh karena itu, pajak sangat menentukan besar kecilnya kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Ditambah lagi karena adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang bertujuan agar pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah lebih mandiri di daerahnya masing-masing dan mengurangterhadap pusat, maka dibutuhkanlah serangkaian upaya agar meningkatkan objek maupun subjek

pajak yang ada.

Pemerintah Daerah harus menggunakan dana yang dimiliki seefisien mungkin, sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi semua lapisan masyarakat. yang adil dan makmur. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah yang digunakan sebagai sarana pembangunan daerah, pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. Fokus perhatian berkenaan dengan pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan Pendapatan Daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya, Pendapatan Daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (BAPENDA) sebagai salah satu badan teknis di bidang pemungutan pendapatan daerah yang melaksanakan kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Daerah khususnya pemungutan pajak-pajak provinsi berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**  
**Tahun 2014-2018 (Dalam Rupiah)**

TAHUN	TARGET PENERIMAAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
2014	577.518.600.000,-	595.679.612.780,-	103,44
2015	664.114.700.000,-	664.496.752.923,-	100,06
2016	814.114.700.000,-	750.764.320.361,-	92,21
2017	777.486.400.742,-	788.639.973.747,-	101,43
2018	1.036.420.637.518,-	850.081.635.310,-	82,01

Sumber: *Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan*

**Tabel 1.2**  
**Daftar Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**  
**Tahun 2014-2018 (Dalam Rupiah)**

TAHUN PAJAK	OBJEK/JUMLAH KENDARAAAN	JUMLAH TUNGGAKAN
2014	224.090	311.976.360.725,-
2015	229.377	288.022.513.075,-
2016	226.155	233.090.568.675,-
2017	238.739	190.561.144.575,-
2018	288.107	149.217.304.600,-
JUMLAH	1.206.468	1.172.867.891.650,-

Sumber: *Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan*

Dari 5 (lima) jenis pajak pada tabel 1.1 yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang paling besar dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akhirnya dapat mempengaruhi Pendapatan Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki potensi yang paling besar dikarenakan saat ini transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi keseluruhan masyarakat. Transportasi menjadi suatu tuntutan dan keharusan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari karena memudahkan



masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi saat ini berkembang pesat bukan hanya transportasi umum, namun juga transportasi pribadi. Masyarakat saat ini memilih untuk memiliki kendaraan pribadi dengan pertimbangan kemudahan dan efisiensi. Terlebih lagi dengan banyaknya kemudahan yang diberikan oleh beberapa pihak yang memberikan kredit, dimana dapat memudahkan masyarakat dalam pembelian kendaraan pribadi. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan pajak provinsi lainnya.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tabel 1.2 belum memberikan hasil yang maksimal. Ini dapat dilihat dari persentase (%) antara target penerimaan dan realisasi yang cenderung menurun. Hal tersebut dipicu karena adanya target penerimaan yang ditetapkan untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang terus meningkat.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu upaya terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah juga belum memberikan hasil maksimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3, dimana masih banyaknya objek tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pada akhirnya mempengaruhi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, faktor-faktor yang menghambat dalam pemungutan dan upaya yang dilakukan.

Berdasarkan dari apa yang disampaikan dalam latar belakang tersebut, Tentang pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2014-2018 yang kemudian dituangkan dalam sebuah penulisan yang berjudul **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN”**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- Untuk mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan?

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, akademisi, dan pemerintah, yaitu:

1. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bagi Penulis, dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan, pengetahuan bagi penulis dalam bidang yang diteliti dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi Program S1 Universitas Tridianti.
3. Bagi Akademis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan, kajian dan informasi bagi penulis selanjutnya yang ingin membahas kembali masalah ini dalam penelitian di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

Ardianti, Desty. 2014. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota)*. Universitas Brawijaya. Malang.

Arditia Reza. 2012. *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.

Be SMARTIVE. 2011. *Pengelompokan Pajak*. Diambil pada tanggal 10 maret 2019 dari <http://catatansmaku.blogspot.co.id/2011/08/pengelompokan-pajak.html>.

J. Khaeril Anwar. 2014. *Analisis Kontribusi Dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Lenri, Rilovingri, dan Hanggoro Pamungkas. 2015. *Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Kasus SAMSAT Kota Manado Tahun 2012-2014)*. Universitas Bina.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.

Peraturan Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Peraturan Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011. *Tentang Pajak Daerah*.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001. *Tentang Pajak Kendaraan Bermotor*.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001. *Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2001. *Tentang Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor*.

Pratama, Amelia Dwi, dan Hanggoro Pamungkas. 2015. *Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jambi dan Pembedayaannya (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Bungo 2011-2013)*. Universitas Bina Nusantara, Jakarta.

Primansyah, Reza. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Putra, 2018. *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Makassar.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Shifa, Viory Sabila & Yunita Anwar. 2013. *Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor” (Studi Kasus SAMSAT Jakarta Pusat)*. Universitas Bina Nusantara, Jakarta.